ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN ATAS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI OLEH PENGADILAN AGAMA SURABAYA (Studi Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Sby)

Raffly Fadilla¹, Hervina Puspitosari²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email : rafflyf1@gmail.com¹, hervina.ih@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

A good judgement is the one that conforms to the applicable rules. The analysis of the court's judgement regarding the granting of polygamy permit aims to examine and analyze the legal and social aspects of the judgement, as well as the legal considerations used by the Panel of Judges. This research employs a normative legal research method that relies on the study of legal literature and interviews as supporting data. The approach used in this study is a case approach based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this research indicate that the Panel of Judges considers both legal and humanitarian aspects in their judgements. Furthermore, the polygamy permit application with Case Number 2469/Pdt.G/2022/PA.Sby, although meets the requirement for polygamy permits under both civil and Islamic law, is deemed incompatible with humanitarian values due to the applicant's income, which is not considered sufficient for practicing polygamy.

Keyword: Polygamy, Religious Courts, Court Verdicts

ABSTRAK

Penilaian yang baik adalah penilaian yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Analisis putusan pengadilan mengenai pemberian izin poligami bertujuan untuk memeriksa dan menganalisis aspek hukum dan sosial putusan, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengandalkan kajian literatur hukum dan wawancara sebagai data pendukung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan aspek hukum dan kemanusiaan dalam penilaiannya. Selanjutnya permohonan izin poligami dengan Nomor Perkara 2469/Pdt.G/2022/PA.Sby, meskipun memenuhi persyaratan untuk izin poligami baik di perdata maupun hukum Islam, dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan karena pendapatan pemohon, yang dianggap tidak cukup untuk mempraktikkan poligami.

Kata kunci: Poligami, Pengadilan Agama, Putusan Pengadilan

PENDAHULUAN

Manusia ialah salah satu entitas yang diciptakan Allah SWT dalam menjalankan apapun yang sudah ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah SWT. Selain menjalankan semua yang telah diberikan ketentuan oleh Allah SWT, semenjak manusia lahir, manusia telah menjadi bagian dari satu kesatuan manusia yang besar dan luas sehingga memunculkan kebudayaan baru, dan pola itu akan terus berulang di setiap wilayah. Sesuai dengan itu, dapat dikatakan bahwa manusia merupakan entitas sosial yang saling terikat dan bergantung satu sama lain.

Lebih lanjut pada makhluk sosial, manusia juga dianggap sebagai makhluk individu karena adanya badan dan roh yang menggerakkan badan tersebut.

Manusia tidak dapat hidup secara independen tanpa bantuan dan dukungan dari sesama manusia, maka secara sosial dan budaya, manusia akan terikat satu sama lain. Hubungan antar sesama manusia dalam istilah Islam disebut sebagai *mu'amallah*. Jika dalam konteks sesama jenis kelamin, ikatan antar-manusia yang terbentuk akan memunculkan istilah teman, sahabat, atau saudara berbeda orang tua. Jika dalam konteks berbeda jenis kelamin, maka ikatan yang akan terjadi adalah perkawinan.

Perkawinan, atau yang sering masyarakat sebut sebagai pernikahan, memiliki banyak makna yang dikemukakan oleh para ahli. Makna perkawinan dan pernikahan dalam berbagai aspek adalah serupa tapi tak sama secara terminologi. Pernikahan memiliki arti yaitu perjanjian bersama antara calon suami dan calon istri melalui *aqad* untuk menjadikan perwujudan keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warrohmah*.

Perkawinan menurut Sayuti Thalib, telah dirumuskan bahwa perkawinan adalah perjanjian yang murni, kokoh, dan teguh untuk hidup bersama-sama secara resmi antara laki-laki dan perempuan yang mengemban pengaruh kuat kepada keluarga yang abadi, sopan santun, saling mengasihi, tentram, dan bahagia. Sehingga, dengan pengertian dan definisi yang serupa tapi tak sama ini, dalam tradisi ajaran Islam, lazimnya terjadi nikah dahulu lalu terjadilah kawin, bukan sebaliknya. Perkawinan juga sudah dimasukkan dalam hukum positif di Indonesia pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan memiliki beberapa dasar dalam prosesnya yaitu sukarela antar pihak, kesepakatan yang dilakukan secara bersama-sama, kebebasan dalam memilih, kemitraan yang abadi dalam pasangan, dan praktik monogami yang inklusif. Pilihan untuk melakukan perkawinan bagi setiap masyarakat, memiliki banyak konsekuensi, baik secara sosial, budaya, maupun hukum. Sehingga perkawinan dianggap sakral dan suci bagi masyarakat.

Perkawinan yang terjadi lebih dari sekali dalam kehidupan seseorang disebut sebagai Poligami. Secara terminologi, kata "poligami" memiliki asal-usul dari bahasa Yunani yaitu

Polus atau *Poli* yang berarti banyak dan *Gamein* atau *Gamos* yang berarti kawin atau perkawinan, yang mana jika digabungkan kata-kata tersebut membentuk kata “Poligami” dengan arti perkawinan yang melibatkan jumlah di atas dua pasangan. Selain itu, poligami juga memiliki dasar hukum dari sumber hukum Islam, yaitu *Al-Quran* melalui *QS An-Nisa* [4]: 3 yang mengandung arti sebagai berikut, “*Jika kamu khawatir tidak dapat memperlakukan wanita yatim secara adil (jika kamu menikahnya), maka nikahilah wanita lain yang kamu sukai: dua, tiga atau empat. Namun, jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau kawinilah hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Itu lebih dekat agar kamu tidak terjerumus dalam perbuatan keburukan dan dosa.*” Selain dari dasar hukum Islam yaitu *Al-Qur’an*, Poligami juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, “Apabila seorang suami memiliki niat untuk memiliki lebih dari seorang istri, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka suami tersebut diwajibkan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan di wilayah tempat tinggalnya.”

Poligami juga memiliki beberapa syarat-syarat yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5 ayat (1) yaitu mendapatkan persetujuan istri pertama, memastikan bahwa sang suami dapat memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dan keperluan hidup yang memadai bagi istri-istri dan anak-anaknya, serta menjamin bahwa sang suami bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Lalu, untuk syarat-syarat pengajuan izin poligami oleh suami yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 mengungkapkan bahwa Pengadilan Agama akan memeriksa berkas-berkas permohonan izin poligami yaitu keberadaan faktor-faktor yang membolehkan suami untuk melakukan kawin kembali seperti dengan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, ada tidaknya persetujuan istri pertama baik secara tertulis ataupun lisan yang diucapkan di muka pengadilan, ada tidaknya penjaminan suami mampu bersikap adil kepada istri-istri dan anak-anaknya dibuktikan menggunakan berbagai surat keterangan penghasilan dan pajak penghasilan, dan keberadaan jaminan suami dapat menjalankan keadilan kepada istri-istri dan anak-anaknya yang disahkan dengan pembuatan surat keterangan dapat berlaku adil dari suami dengan tanda tangan di atas materai.

Poligami adalah konsep pernikahan dimana sang suami harus mampu bersikap adil, salah satunya dalam bentuk nafkah. Nafkah pun terbagi kembali menjadi 2 (dua) jenis yaitu nafkah bersifat fisik atau lahiriah dan nafkah yang memiliki sifat emosional atau batiniah. Nafkah secara lahiriah yang dimaksud adalah dalam bentuk kemampuan menafkahi keluarga dalam memenuhi kebutuhan harian. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat dilakukan ketika penghasilan yang dihasilkan dapat dan mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga dengan minimal 1 (satu) orang suami dan 2 (dua) orang istri. Oleh karena itu, diharapkan bahwa suami sebagai kepala keluarga mampu untuk menghidupi kebutuhan keluarga harian yang mana dapat ditinjau dari penghasilan sang suami. Standar dari penghasilan yang dianggap mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari adalah dengan Upah Minimum. Upah Minimum ialah standard upah bagi para pekerja yang mana didasarkan pada standar hidup dan taraf hidup di masing-masing wilayah, sehingga jumlah yang ditentukan tiap wilayah berbeda.

Namun, pada kenyataannya terdapat putusan dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa mengizinkan permohonan poligami meskipun penghasilan dari sang suami dibawah Upah Minimum. Sedangkan pada putusan-putusan permohonan izin poligami yang lain yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, taraf penghasilan yang dimiliki oleh pemohon berada di sekitar upah minimum atau bahkan lebih. Sebagai contoh pada Putusan Nomor 3886/Pdt.G/2022/PA.Sby tercantum pada posita bahwa pemohon memiliki penghasilan yang berada di sekitar upah minimum yang ditentukan. Selain itu, pada Putusan Nomor 3527/Pdt,G/2022/PA.Sby juga dituliskan dalam posita bahwa pemohon memiliki penghasilan jauh di atas upah minimum, sehingga hal itu dapat dijadikan keyakinan bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istrinya dan anak-anaknya. Namun, pada Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Sby termuat dalam posita bahwa pemohon memiliki penghasilan di bawah upah minimum dan permohonan izin poligami pemohon diterima yang mana dalam perjalanannya penghasilan di bawah upah minimum dikhawatirkan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Selain itu, kehidupan berpoligami secara khusus ataupun kehidupan seseorang yang berumah tangga secara umum, tidak terlepas dari adanya kebaikan-kebaikan dan keberkahan yang muncul selama berumah tangga dan berpoligami. Kebaikan dan keberkahan yang

dimaksud adalah sebuah konsep yang disebut dengan *Maslahah* ini menjadi landasan bagi semua masyarakat Muslim yang sudah berumah tangga atau bahkan sang suami yang ingin mengajukan permohonan izin poligami. Karena pemenuhan dari konsep *Maslahah* ini akan membawa rumah tangganya menuju kehidupan dunia dan akhirat yang baik dan penuh berkah. Oleh karena itu, pemenuhan dari semua aspek yang dibutuhkan dalam rumah tangga “baru” yang akan dibangun dengan konsep poligami selayaknya diharuskan memenuhi kaidah-kaidah dalam konsep *Maslahah*. Serta kekhawatiran dalam ketidaksanggupan Pemohon dalam memenuhi kebutuhan hidup kedua istri dan kedua anaknya ini merupakan hal yang bertolak belakang dengan konsep *Maslahah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif ialah penelitian yang terpusatkan pada analisis hukum yang berlaku beserta norma-norma hukum yang relevan. Penelitian yuridis normatif ini perlu adanya masalah atau kasus yang bersifat faktual di masyarakat ataupun yang bersifat hipotesis. Dari penelitian yuridis normatif ini, peneliti dapat melakukan analisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU Perkawinan dan berbagai peraturan turunannya terkait dengan perkawinan poligami. Dikarenakan penulis menerapkan penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pengkajian utama pada pendekatan kasus ini merupakan *ratio decidendi*, yaitu pertimbangan pengadilan hingga pada putusan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Permohonan Izin Poligami

Kuasa sepenuhnya terhadap pilihan putusan tersebut berada di tangan Majelis Hakim yang bersidang pada permohonan izin poligami tersebut. Majelis Hakim akan sebelumnya melihat dan melakukan pertimbangan dari alasan dan faktor yang telah dikemukakan oleh pemohon yang digunakan sebagai dasar hukum permohonan izin poligami. Majelis Hakim juga diharuskan melihat dari berbagai sudut pandang, seperti sudut pandang keadilan dan akibat-akibat yang akan terjadi setelah putusan ini berlaku.

Majelis Hakim akan melihat, jika posisi termohon, dalam hal ini istri dari pemohon, masih terbukti dan dapat dinyatakan sehat serta masih memiliki kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, secara normatif Majelis Hakim akan mempertimbangkan putusan yang akan dikeluarkan dari syarat-syarat alternatif dan syarat-syarat kumulatif dalam Undang-Undang Perkawinan meskipun dalam praktiknya tidak berlaku seperti itu. Sehingga, putusan yang dihasilkan oleh Majelis Hakim tidak hanya dipandang dari pertimbangan secara hukum namun juga dipandang secara kemanusiaan.

Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan apakah permohonan izin poligami ini memiliki kemungkinan untuk dikabulkan adalah dari 2 (dua) sisi, yaitu dari kemampuan pemohon dan sisi keadilan dari pemohon, yang mana 2 (hal) itu menjadi komponen penting bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami. Kemampuan pemohon tidak hanya dilihat dari status pekerjaan yang dimiliki oleh pemohon, tetapi seberapa besar pemohon tersebut memiliki penghasilan dan dapat dibuktikan dengan alat bukti surat yang valid. Dalam kasus perkara ini, pekerjaan sebagai *security* di salah satu perusahaan di Surabaya yang dimiliki oleh pemohon tidak berpengaruh terhadap putusan permohonan izin poligaminya meskipun secara data penghasilan yang dihasilkan dari pekerjaan *security* di Surabaya adalah kurang lebih Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan. Sehingga, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan apa jenis pekerjaan yang dimiliki oleh pemohon, namun hanya melihat seberapa banyak penghasilan yang dihasilkan oleh pemohon dalam 1 (satu) bulan dengan standar Upah Minimum di suatu wilayah sehingga Majelis Hakim akan menganggap bahwa Pemohon telah sanggup untuk membiayai kehidupan istri-istri dan anak-anaknya. Jika ditinjau dari pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim pada putusan permohonan izin poligami ini, bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini dalam sudut pandang kemampuan Pemohon dalam pemenuhan kebutuhan hidup dirinya dengan istri-istrinya dan anak-anaknya, memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan surat keterangan penghasilan dari kepala desa yang telah dilampirkan oleh Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp

5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, dikuatkan dengan adanya pengakuan dari Termohon dan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang didatangkan oleh Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon dianggap memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk menjamin kehidupan dan keperluan dan kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya.

Pertimbangan terhadap kemampuan dari Pemohon untuk memberikan penghidupan yang pantas bagi istri-istri dan anak-anaknya di masa depan juga berbanding lurus dengan sisi keadilan suami yang dimiliki oleh Pemohon. Konsep keadilan yang haruslah dimiliki oleh suami yang melakukan pengajuan permohonan izin poligami berisi 2 (dua) unsur jenis keadilan, antara lain keadilan secara beradab yang mana merupakan keadilan yang didasarkan pada tingkah laku dan kebaikan paling tinggi dari perilaku manusia dan keadilan secara teologis yang mana adalah keadilan yang cocok dengan dogma-dogma agama berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Kedua unsur jenis keadilan ini haruslah dilengkapi oleh suami yang mengajukan permohonan izin poligami dan dapat dibuktikan di muka persidangan. Terutama unsur keadilan secara beradab karena untuk pembuktian unsur keadilan secara teologis tidak ada standar yang pasti karena hubungan antara manusia dengan Tuhannya tergantung masing-masing pribadi. Untuk standar dari unsur keadilan secara beradab dapat diukur dari alat bukti surat yang menyatakan bahwa Pemohon dapat berlaku adil serta didukung dengan alat bukti lain berupa saksi-saksi yang dibawa Pemohon ke muka persidangan. Pemohon juga mengeluarkan keterangan saat persidangan bahwa Pemohon menyanggupi berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya sudah memenuhi syarat sehingga Majelis Hakim memiliki penilaian Pemohon layak untuk melakukan praktik poligami. Meskipun standar dari keadilan itu sendiri masih sangat rancu dan sangat membutuhkan kebijaksanaan Majelis Hakim dalam prosesnya sesuai dengan fakta yang muncul pada perkara ini. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu pertimbangan hukum dengan dasar Undang-Undang dan pertimbangan hukum atas dasar kemanusiaan. Pertimbangan atas dasar Undang-Undang ini sudah diketahui bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara permohonan izin poligami menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim menggunakan ketiga sumber hukum tersebut dalam pertimbangan hukum yang didasarkan pada Undang-Undang. Majelis Hakim akan melihat apakah syarat-syarat alternatif dan syarat-syarat kumulatif yang terdapat pada Undang-Undang telah dipenuhi oleh Pemohon. Sedangkan, pada pertimbangan hukum yang didasarkan pada kemanusiaan, terdapat beberapa hal yang membuat Majelis Hakim dapat mengkabulkan atau menolak sebuah perkara permohonan izin poligami. Terdapat beberapa kasus dari permohonan izin poligami yang membutuhkan pertimbangan hukum yang didasarkan pada kemanusiaan, contohnya adalah kasus permohonan izin poligami dimana pihak Termohon menginginkan adanya poligami dikarenakan Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon, sehingga Termohon mengizinkan Pemohon untuk melaksanakan praktik poligami secara sah di mata hukum.

Untuk pertimbangan hukum yang didasarkan pada kemanusiaan yang muncul pada putusan yang dikaji, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hubungan secara personal dan romansa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon sudah berlangsung dalam waktu yang lama dan akan menjadi kompleks untuk dipisahkan. Pemohon juga memiliki niatan yang sangat tinggi untuk berpoligami meskipun Majelis Hakim sudah memberikan penjelasan dan petunjuk tentang kewajiban yang akan ditanggung Pemohon jika Pemohon telah melaksanakan poligami. Selain itu, melihat kondisi hubungan yang sudah dijalani oleh Pemohon beserta calon istri kedua Pemohon, sangat dikhawatirkan jika memunculkan akibat-akibat negatif jika Pemohon tidak diberikan ijin untuk berpoligami dengan calon istri kedua Pemohon. Pertimbangan lain yang dilihat oleh Majelis Hakim adalah dikabulkan atau tidaknya permohonan izin poligami ini antara Pemohon dan Termohon ini tentu akan memunculkan *mudharat* (resiko), hingga bahkan sampai memunculkan dampak buruk bagi Pemohon maupun Termohon, tetapi Majelis Hakim memiliki penilaian bahwa *mudharat* yang muncul bagi Pemohon dan Termohon akan jauh lebih besar dan lebih terasa dampaknya jika permohonan izin poligami ini tidak dikabulkan. Majelis Hakim akan memilih *mudharat*

yang lebih ringan daripada *mudharat* yang lebih berat jika dari semua pilihan memiliki kadar *mudharat* masing-masing.

Majelis Hakim yang dipimpin oleh Drs. Tayeb, S.H.,M.H. menggunakan pertimbangan yang lebih condong didasarkan menggunakan pertimbangan hakim secara kemanusiaan. Analisis yang digunakan oleh Majelis Hakim lebih melihat kepada kondisi faktual dari pemohon, termohon, maupun calon istri kedua dalam pengambilan putusan ini. Secara garis besar, hampir semua putusan dari perkara permohonan izin poligami, Majelis Hakim akan melihat dahulu kesesuaian antara poin-poin permohonan yang diajukan, bukti-bukti surat pendukung, serta keadaan faktual yang terjadi pada para pihak, sehingga 3 (tiga) hal ini sangat berkesinambungan. Pilihan resiko yang muncul di antara 2 (dua) pilihan yang tersedia juga memunculkan teori *Maslahah Mursalah* yang mana menjadikan pilihan dari resiko yang paling kecil untuk kebaikan bersama, sehingga putusan yang diambil dianggap mengandung kebaikan-kebaikan yang akan dirasakan oleh pemohon, termohon, dan calon istri keduanya setelah putusan dikeluarkan. Sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim diatas, pada Putusan Perkara Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Sby, Majelis Hakim mengeluarkan amar putusan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi atau berpoligami dengan calon istri kedua dari Pemohon, mengingat Pemohon memenuhi semua persyaratan dan dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terjadi.

2. Permohonan Izin Poligami Jika Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Di Indonesia

Putusan permohonan izin poligami adalah sebuah *output* dari sebuah proses perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh pemohon izin poligami. Kehidupan poligami memunculkan banyak stigma yang muncul di masyarakat, yang mana membuat orang-orang yang akan melaksanakan poligami cenderung untuk menutupi bahwa mereka akan berpoligami. Padahal, dalam hukum positif di Indonesia, poligami dan syarat-syaratnya juga telah diatur, sehingga stigma-stigma yang muncul dalam masyarakat tidak perlu terjadi. Dan juga stigma-stigma ini muncul karena dalam prinsip hukum perkawinan perdata di Indonesia salah satunya merupakan menganut prinsip monogami. Asas monogami merupakan sebuah asas bahwa pada saat yang bersamaan seorang laki-laki sebagai suami hanya sebatas diijinkan memiliki seseorang perempuan

sebagai istrinya, serta seorang perempuan sebagai istri hanya diperbolehkan mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya. Keberadaan prinsip asas monogami dan dengan maksud membentuk keluarga yang utuh serta selamanya, oleh karena itu, suatu perbuatan yang akan menyebabkan terpisahnya suatu hubungan perkawinan (terkait dengan ini yang dimaksud merupakan perceraian) diharuskan betul-betul diperhatikan dan dipertimbangkan secara matang oleh sang suami maupun istri. Karena jika perceraian itu sampai terjadi akibatnya akan membawa konsekuensi yang besar, tidak cuma melibatkan suami atau istri, namun juga nasib dari anak-anak harus diberikan perhatian. Oleh karena itu, diinginkan agar supaya tidak dengan mudah untuk menyelenggarakan perkawinan serta tidak gampang untuk bercerai.

Masyarakat di Indonesia hanya dapat diizinkan oleh yang bersangkutan, yang mana adalah sang istri kepada sang suami, jika Hukum dan Agama yang terkait memberikan izin, maka seorang suami boleh beristeri lebih dari satu. Meskipun perkawinan yang dilakukan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri dapat terjadi dan hal tersebut diperlukan dan diizinkan oleh pihak-pihak yang terlibat secara langsung, memiliki istri lebih dari seorang hanya mampu dilakukan jika seorang tersebut memenuhi berbagai syarat-syarat tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan Agama domisili. Hukum perdata di Indonesia yang mengatur tentang Perkawinan ini menganut pandangan bahwa calon suami isteri itu diharuskan matang secara mental dan fisiknya untuk dapat mengadakan perkawinan, supaya dapat merealisasikan tujuan dari perkawinan secara baik dan tidak akan berakhir pada perceraian serta mendapatkan keturunan-keturunan yang baik dan sehat.

Asas prinsip monogami dalam hukum perdata perkawinan di Indonesia bisa gugur jika dalam putusan permohonan izin poligami, dalam pertimbangan hakim telah disebutkan bahwa gugurnya asas monogami telah menjadi pilihan dan kesepakatan antara pihak suami ingin berpoligami dan istri yang dipoligami. Meskipun begitu, tidak serta merta bahwa asas monogami dapat digugurkan, mengingat bahwa adanya beberapa syarat-syarat yang diharuskan untuk dipenuhi dalam pengguguran asas monogami ini. Hasil dari pengguguran asas monogami adalah pengkabulan

permohonan izin poligami yang diminta oleh sang suami sebagai Pemohon kepada Majelis Hakim.

Secara sosial, pelaksanaan poligami disini dianggap cenderung untuk memfasilitasi suami-suami diluar sana yang ingin menambah istri dengan tujuan apapun yang ingin suami-suami ini capai, sehingga banyak istri-istri yang merasa terdiskriminasi dalam pelaksanaannya. Bisa dibilang bahwa poligami merupakan hal yang pada umumnya dijauhi dan dihindari oleh para wanita yang sudah bersuami, karena pada praktik poligami, kecenderungan akan terjadinya diskriminasi terhadap wanita, di mana wanita adalah objek dari laki-laki dalam konteks kehidupan rumah tangga yang telah terbangun. Pelaksanaan praktik poligami, jika tidak adanya batasan dengan peraturan-peraturan yang mengikat maka akan memunculkan suatu hal yang bersifat buruk dalam penegakkan rumah tangganya. Supaya hal-hal yang bersifat tidak baik dapat dihindari dalam rumah tangga, maka dari itu Undang-undang Perkawinan memberikan batasan kepada poligami dengan alasan-alasan dan syarat-syarat secara spesifik. Undang-undang Perkawinan memberikan sebuah kepastian secara hukum bahwa perkawinan yang dilaksanakan benar-benar akan membawa manfaat dan berkah bagi yang melaksanakannya, yaitu sejalan dengan tujuan pernikahan, selain sebagai bentuk ibadah dan juga berkeinginan untuk membangun keluarga yang bahagia, tenang, penuh rasa saling kasih-sayang.

Masyarakat yang beragama Islam di Indonesia merupakan masyarakat yang terbentuk dari beragam macam sosial serta budaya yang menyertai dirinya, bisa dibilang bahwa masyarakat yang beragama Islam di Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat kejamakan yang tinggi. Meskipun begitu, poligami bukan berarti hak spesial yang laki-laki beragama Islam miliki dan kapan saja bisa dilakukan. Oleh karena itu, poligami harus didasarkan pada sebuah peraturan resmi di Indonesia yang tepat dengan karakter masyarakat dan sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam dan plural agar tidak terjadi kemungkinan-kemungkinan masalah pada sosial khususnya dalam kehidupan rumah tangga dan tentu juga yang akan menjadi pihak korban adalah kaum perempuan atau istri-istri.

Istilah “monogami” dan istilah “poligami” merupakan dua kata yang memiliki arti berbeda atau bisa dibilang sebagai kontradiktif (bisa juga dibilang antonim). Karena memiliki arti yang berbeda, sudah barang tentu dalam makna penggunaannya juga berbeda. Meskipun demikian, kedua istilah tersebut dapat bertemu dalam kerangka hukum perkawinan di Indonesia. Pada sisi yang lain, ditinjau dari budaya dan karakter masyarakat muslim Indonesia yang plural juga diperlukan kehadiran hukum yang berlaku dan bisa diterapkan serta diterima oleh masyarakat setempat yang berbeda-beda budaya, karakter dan tradisinya, termasuk hukum perkawinan. Untuk melindungi ketertiban dan penjagaan terhadap kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan, diperlukan adanya intervensi dari negara atau pemerintah yaitu dengan mengeluarkan undang-undang perkawinan sebagai landasan yuridis terhadap ikatan perkawinan. Hal ini terbukti dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan permohonan izin poligami, yang mana jadi salah satu *output* produk hukum dari Pengadilan Agama, harus sama dengan kaidah-kaidah dari hukum perkawinan yang berlaku secara umum di Indonesia. Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dapat diperhatikan dari 2 (dua) sudut pandang yang saling berhubungan, yaitu dapat dikaji dari hukum perdata dan hukum Islam. Hukum perdata disini menggunakan dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Poligami di Indonesia jika dinilai dari sisi hukum perdata hanya dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikarenakan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek voor Indonesie*) menjelaskan bahwa asas perkawinan yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah asas prinsip monogami. Asas prinsip monogami ini secara implisit telah disebutkan pada Buku Kesatu tentang Orang, Bab IV tentang Perkawinan, Bagian Satu tentang Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Untuk Dapat Melakukan Perkawinan, Pasal 27 yang berbunyi “Pada saat yang bersamaan, seorang pria hanya dapat kawin dengan satu wanita saja; dan begitu pula seorang wanita hanya

dapat kawin dengan seorang pria saja". Sehingga peraturan mengenai poligami atau beristri lebih seorang hanya dimiliki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jika ditinjau dari hukum perdata saja.

Beberapa persyaratan diberikan kepada pemohon jika ingin melakukan pengajuan permohonan izin poligami sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama akan mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan poligami dalam rumah tangganya jika syarat-syarat yang tertera pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan salah satunya terpenuhi. Syarat-syarat ini adalah syarat alternatif yang diperlukan salah satunya untuk mendapatkan izin adalah:

- a. Istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri; dan/atau
- b. Istri mengalami kecacatan fisik atau penyakit yang tidak dapat sembuh; dan/atau
- c. Istri tidak mampu memberikan keturunan.

Pada posita yang sudah dituliskan pada putusan permohonan izin poligami, terdapat 3 (tiga) alasan pemohon ingin berpoligami, yaitu pemohon memiliki energi yang berlebih, pemohon berkeinginan untuk memiliki anak lebih dari seorang sedangkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon hanya diberikan 1 (satu) orang anak, dan Pemohon telah melakukan perkawinan secara siri dan dari hasil perkawinan siri ini calon istri kedua dari Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan. Dan semua ketiga alasan pemohon tersebut, Majelis Hakim juga telah memperhatikan ketiga alasan tersebut sehingga ketiga alasan tersebut dimasukkan Majelis Hakim sebagai fakta yang terjadi di lapangan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari 3 (alasan) pemohon adalah sang istri dianggap tidak atau kurang mampu dalam melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Jika ditinjau dari syarat alternatif dari permohonan izin poligami pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka syarat alternatif tersebut sudah terpenuhi. Memang apabila salah satu syarat alternatif telah dipenuhi, syarat yang lain tidak perlu ditinjau kembali.

Disamping syarat-syarat alternatif, terdapat juga syarat-syarat kumulatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk syarat kumulatif ini, semua persyaratan yang ada harus terpenuhi tanpa terkecuali. Jika terdapat salah satu persyaratan tidak tercukupi, maka dari itu, permohonan izin poligami dapat ditolak oleh Majelis Hakim. Syarat-syarat kumulatif menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- a. Istri pertama memberikan persetujuan; dan
- b. Terdapat kepastian bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan
- c. Suami memberikan jaminan akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Lalu, pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (b), disebutkan bahwa “persetujuan istri, baik secara lisan maupun tertulis, menjadi pertimbangan untuk menentukan ada atau tidaknya persetujuan. Jika persetujuan tersebut bersifat lisan, persetujuan tersebut harus diungkapkan di muka persidangan pengadilan”. Pada putusan tersebut, terdapat dalam posita dituliskan bahwa istri pertama dari pemohon tidak berkeberatan kalau suaminya menikah kembali bersama dengan calon istri kedua dan istri pertamanya sudah membuat surat pernyataan kesanggupan dipoligami oleh suaminya. Selain itu, istri pertama dari pemohon juga telah datang di muka persidangan dan menjelaskan kalau beliau tidak berkeberatan terhadap pilihan pemohon dalam berpoligami dan membenarkan semua alasan yang telah dituliskan pemohon. Sehingga, syarat kumulatif pertama yaitu “Istri pertama memberikan persetujuan” telah terpenuhi.

Selanjutnya, dari syarat kumulatif kedua yang berbunyi “terdapat kepastian bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka”, tinjauan mengenai ini lebih banyak lagi. Pada Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “terdapat kepastian bahwa suami dapat memenuhi

kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dengan memberikan kepada Pengadilan :

- a. surat keterangan mengenai pendapatan suami dan telah ditandatangani oleh bendahara dari tempat kerjanya; atau
- b. surat keterangan pajak penghasilan; atau
- c. surat keterangan lain yang bisa diterima oleh Pengadilan.”

Pada posita yang tertera pada putusan tersebut, pemohon menuliskan kesanggupannya untuk melakukan pemenuhan kebutuhan hidup istri pertama dan calon istri kedua dengan memiliki pendapatan bersih tidak kurang dari sebesar 5 (lima juta rupiah) per bulan dan calon istri keduanya juga memiliki penghasilan kurang lebih sebesar 5 (lima juta rupiah) per bulan. Tidak hanya itu, pemohon juga telah menyertakan bukti pendukung dalam bentuk surat pernyataan penghasilan yang dikeluarkan oleh perusahaan tempat beliau bekerja, sehingga validitas dari penghasilan yang dimiliki oleh pemohon cukup valid dan diterima oleh pengadilan. Oleh sebab itu, pemohon juga sudah memenuhi syarat kumulatif yang kedua tersebut.

Untuk syarat kumulatif yang ketiga dan terakhir, yang berbunyi “suami memberikan jaminan akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka”, sesuai dengan posita yang terdapat dalam putusan tertulis bahwa istri pertama dari pemohon menyetujui alasan-alasan dari pemohon untuk melakukan poligami dengan syarat bahwa pemohon mampu untuk bersikap adil dalam membagi waktu pemohon untuk istri pertama dan calon istri kedua, pemohon tetap membiayai keperluan hidup istri pertama dan anaknya, serta tidak boleh menelantarkan istri pertama dan anaknya yang mana pemohon menyetujui dan bersedia untuk memenuhi hal tersebut. Lalu, pada Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “suami memberikan jaminan akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu”, pemohon juga telah melampirkan surat pernyataan kesanggupan untuk berlaku adil bagi kedua istrinya dan anak-anaknya. Pada akhirnya, pemohon juga telah memenuhi syarat kumulatif yang ketiga, sehingga secara hukum perdata,

permohonan izin poligami yang dilakukan oleh pemohon sudah sesuai dan sah secara hukum serta tidak memiliki cacat materil.

Perkawinan dalam Islam bisa ditinjau dari 3 (tiga) perspektif, yaitu: dari perspektif hukum, sudut pandang sosial, dan sudut pandang agama. Dari perspektif hukum, perkawinan adalah sebuah perjanjian yang sangat kokoh "*mitsaaqaon ghaliidan*" (Al-Qur'an Surah an-Nisa' (4):27, "Dan istri-istrimu telah mengambil darimu perjanjian yang kokoh"). Ditinjau dari sudut pandang sosial, perkawinan adalah cara peningkatan status sosial seorang dalam bermasyarakat. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang agama, perkawinan ini dianggap sebagai salah satu lembaga yang suci, karena pasangan suami istri itu dipersatukan menggunakan nama Allah SWT. Oleh karena itu, perkawinan menurut Islam sangat sakral untuk dilakukan oleh manusia. Meskipun begitu, dalam Islam juga diperbolehkan untuk manusia jika ingin berpoligami, tentunya dengan banyak syarat yang harus dipenuhi oleh manusia.

Syarat-syarat terjadinya poligami di Indonesia yang didasarkan pada Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Bab Beristri Lebih Dari Seorang. Secara garis besar, syarat-syarat dari poligami pada Kompilasi Hukum Islam, dengan syarat-syarat poligami pada Undang-Undang Perkawinan tidak jauh berbeda, namun terdapat beberapa syarat-syarat yang belum ada di Undang-Undang Perkawinan namun terdapat pada Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Suami hanya diperbolehkan untuk beristri paling banyak 4 (empat) orang secara bersamaan (Pasal 55 ayat [1] Kompilasi Hukum Islam)
- b. Suami diharuskan untuk dapat bertingkah laku adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya, dan jika tidak dapat bertingkah laku adil maka suami tidak diizinkan beristri lebih dari seorang. (Pasal 55 ayat [2] dan ayat [3] Kompilasi Hukum Islam)
- c. Suami diharuskan mendapat perizinan untuk berpoligami dari Pengadilan Agama sesuai kewenangan absolut yang berlaku. Jika sang suami nekat melakukan poligami tanpa memiliki izin dari Pengadilan Agama, perkawinan poligami tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. (Pasal 56 ayat [1] dan ayat [3] Kompilasi Hukum Islam)

- d. Jika sang istri berkata tidak dalam pemberian persetujuan untuk sang suami berpoligami, dan permohonan izin poligami yang disodorkan memiliki dasar serta alasan yang sah di mata hukum, maka Pengadilan Agama diperbolehkan untuk memberikan penetapan pemberian izin sesudah melakukan pemeriksaan dan mendengarkan istri pertama yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama. Pada penetapan ini, istri/suami yang merasa kurang puas pada putusan permohonan izin poligami dapat melakukan pengajuan banding atau kasasi. (Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam)
- e. Suami diharuskan untuk mendapatkan persetujuan dari istri dan memiliki kepastian bahwa sang suami bisa untuk memunculkan jaminan pemenuhan keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan ini dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. (Pasal 58 ayat [1] dan ayat [2] Kompilasi Hukum Islam)

Selain syarat-syarat diatas, dalam Islam sendiri terdapat dasar hukum yang memuat tentang konsep sang suami mampu dan dapat berlaku adil, yaitu tertera pada Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4):129 yang memiliki arti *"Dan kamu tidak akan mampu memperlakukan istri-istri(mu) dengan adil meskipun kamu sangat menginginkannya, oleh karena itu janganlah terlalu memihak (kepada yang kamu cintai) sehingga mengabaikan yang lain terkandung-katung"*. Pada ayat ini, dijelaskan bahwa suami tidak mungkin untuk mampu untuk bersikap adil pada istri-istrinya dengan alasan apapun. Walaupun begitu, suami masih memiliki hak untuk memilih berpoligami dengan syarat-syarat dan ketentuan diatas. Dikarenakan syarat-syarat dalam berpoligami dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki kemiripan yang banyak dengan syarat-syarat berpoligami dalam Undang-Undang Perkawinan, maka permohonan izin poligami dengan nomor perkara Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Sby telah memenuhi semua syarat-syarat yang diperlukan untuk permohonan izin poligami sehingga tidak memiliki kecacatan materiil dalam prosesnya.

Namun, pada putusan nomor perkara 2469/Pdt.G/2022/PA.Sby ini tidak sesuai berdasarkan teori *maslahah*. sebuah hal yang dianggap sebagai maslahat diharuskan untuk mendapatkan keberkahan dalam bentuk apapun, dalam putusan ini tidak ditemukan adanya kemaslahatan yang didapatkan oleh salah satu pihak. Padahal sesuai

dengan teori *masalah* menurut Imam Al-Ghazali dimana segala usaha dalam pemenuhan pemeliharaan 5 (lima) aspek yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, pengkabulan putusan ini tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) aspek tersebut, sehingga putusan tersebut dapat dianggap tidak sesuai dengan teori *masalah* yang ada. Dalam aspek agama, memang putusan ini sudah dapat dianggap memenuhi usaha dalam pemeliharaan berdasarkan dasar dari Al-Quran yang dipakai dalam pertimbangan hukum yang diambil ketika mempertimbangkan putusan tersebut. Lalu, pada pemenuhan jiwa yang mana tidak memiliki dasar tertentu yang bisa dijadikan patokan sehingga pemenuhan jiwa dapat dilihat berdasarkan kesadaran dan kemauan dari para pihak untuk melakukan praktik poligami ini. Pada pemenuhan secara akal pun juga tidak memiliki sebuah dasar patokan yang pasti, yang mana pemenuhan secara akal dapat ditinjau dari hasil putusan dari pertimbangan-pertimbangan hakim yang sudah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini. Setelah itu, pada pemenuhan aspek keturunan, hal ini masih menjadi tinjauan yang harus ditinjau lebih jauh karena pada awalnya Pemohon telah memiliki seorang buah hati dan akan memiliki buah hati lagi pada calon istri kedua, sehingga Pemohon mengajukan izin poligami itu. Hal ini berhubungan dengan pemenuhan aspek harta, dimana bahwa harta disini digunakan sebagai salah satu jalan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan hidup dari keturunan-keturunan yang dihasilkan, sehingga menghasilkan kebaikan dan mengurangi keburukan yang akan terjadi. Tetapi, pada faktanya Pemohon disini memiliki taraf hidup yang berada di ambang batas berdasarkan penghasilan yang Pemohon miliki. Sehingga dikhawatirkan jika Pemohon berada di ambang batas patokan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, Pemohon tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup keturunan-keturunannya. Lalu yang muncul bukanlah *masalah* seperti yang diharapkan, melainkan *mudharat* dikarenakan ketidakmampuan Pemohon dalam menghidupi keturunan yang dimilikinya.

Selain itu, Pihak yang dirugikan disini adalah pihak Termohon, yang mana merupakan istri pertama dari Pemohon. Penulis beranggapan bahwa hanya dikarenakan sang suami memiliki energi berlebih, tidak harusnya dijadikan alasan yang tepat untuk berpoligami. Sang suami harusnya melakukan berbagai upaya bersama

sang istri untuk menyelesaikan bagaimana energi berlebih yang dimilikinya bisa tersalurkan dengan baik dan tidak mengganggu kehidupan sehari-harinya. Permohonan izin poligami bukanlah solusi yang tepat dari permasalahan tersebut, masih banyak usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh suami dan istri tersebut. Hal ini juga sesuai dengan pemeliharaan aspek jiwa, yang mana suami istri haruslah menjadikan jiwanya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dibagi ataupun dipisahkan. Sehingga, seperti apa yang telah dikemukakan oleh Al-Syatibi yaitu terdapat adanya tingkatan-tingkatan dalam tujuan syariat dari setiap hukum Allah, capaian untuk penyatuan jiwa yang abadi dari sepasang suami istri dapat dikategorikan pada *maqasid al-tahsiniyat* yang mana manusia mampu untuk melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan lima unsur pokok. Suami istri dapat melakukan penyempurnaan perkawinan mereka dengan komitmen penyatuan jiwa tersebut, sehingga pikiran untuk beristri lebih dari seorang tidak akan terpikirkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan dari permohonan izin poligami muncul berdasarkan dari pertimbangan dari Majelis Hakim yang bertugas pada perkara tersebut. Majelis Hakim akan melihat syarat-syarat alternatif dan syarat-syarat kumulatif dari permohonan izin poligami sudah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim pada prosesnya juga akan melihat dan mempertimbangkan permohonan izin poligami yang dapat dikabulkan atau tidak pada 2 (dua) sisi, yaitu sisi kemampuan Pemohon dalam memenuhi kebutuhan dan sisi keadilan yang dimiliki Pemohon. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim terdiri dari 2 (dua) sudut, yaitu sudut pandang pertimbangan hukum dengan dasar Undang-Undang dan sudut pandang pertimbangan hukum atas dasar kemanusiaan.
2. Permohonan izin poligami jika ditinjau dari sudut pandang hukum perkawinan perdata memiliki 2 (dua) jenis syarat, yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat-syarat alternatif dibagi menjadi 3 (tiga) syarat yang dapat dipenuhi hanya salah satunya, yaitu

istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; dan/atau istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan/atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Lalu untuk syarat-syarat kumulatif terdapat 3 (tiga) syarat yang semuanya harus dipenuhi, yaitu adanya persetujuan dari istri atau istri-istri; dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Selama permohonan izin poligami memenuhi syarat-syarat diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan seksama dan akan memberikan putusannya. Untuk permohonan izin poligami jika ditinjau dari sudut pandang hukum perkawinan islam tidak jauh berbeda sehingga batas minimum isi dari permohonan izin poligami termasuk sama supaya permohonan izin poligami tidak cacat materil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Manan, Abdul. 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika)
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga Belas (Jakarta: Prenamedia Group)
- Muchsin. 2003, *Hukum Islam Dalam Perspektif Dan Prospektif*, (Surabaya: Yayasan Al-Ikhlas)
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. 2015, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama)
- Rachman, Anwar, dkk. 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Prenamedia Group)
- Soekanto, Soerjono. 1994, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada)
- Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011, *Studi Hukum Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press)
- Elok Nawangsih dan Ghufran Hasyim Achmad, "*Hakikat Manusia dalam Konteks Pendidikan Islam*", *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*. Vol. 4 No. 2, Tahun 2022, hal 3034-3044. DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2650>
- Mustika Anggraini Dwi Kurnia dan Ahdiana Yuni Lestari, "*Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami*", *Media of Law and Sharia*. Vol. 4. No.1, Tahun 2022, hal 51-66. DOI: <https://doi.org/10.18196/mls.v4i1.17333>
- Zainuddin, Mohammad Yadi Harahap, Ramadhan Syahmedi, "*Konsekuensi Hukum Poligami Di Indonesia Dan Tunisia: Perspektif Teori Kepastian Hukum Dan Masalah Mursalah*", *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol. 10 No. 2, Tahun 2022, hal 373-392. DOI: <http://dx.doi.org/10.30868/am.v10i02.2770>
- David Tan, "*Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*". Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan

- Sosial, Vol. 8 No. 8, Tahun 2021, hal 2463-2478. DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
- Eka N.A.M. Sihombing dan Chyntia Hadita, "*Konstitusionalitas Poligami Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam Di Indonesia*", Mahakim: Journal of Islamic Law, Vol. 5 No. 1, Tahun 2021, hal 11-26. DOI: <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i1.131>
- Mieke Anggraini Dewi. "*Tinjauan yuridis UU no. 16 tahun 2019 menurut asas monogami dan hubungan hukum dalam perkawinan*". Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol. 17. No.2. Tahun 2020, hal 138-145. DOI: <http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v17i2.1495>
- Noer Yadi Izzul Haq, "*Asas Monogami Perkawinan Pada Izin Poligami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Gender dan Hukum Progresif*". Thesis. URL: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55836>
- Wardah Nuroniyah dkk, "*Persepsi Hakim Mengenai Adil Sebagai Syarat Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kota Cirebon*". Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 3. No. 2. Tahun 2018, Hal. 258-272. DOI: <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v3i2.3420>
- Wawancara Dengan Drs. Tayeb, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 10 Mei 2023 di Pengadilan Agama Surabaya, Pukul 11.30 WIB
- Wawancara Dengan Koes Atmaja Utama, S.Hi.,S.H.,M.H. Selaku Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya di Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 25 Mei 2023 Pukul 12:00 WIB
- Gaji Staf Security Di Surabaya, <https://id.indeed.com/career/staf-security/salaries/Surabaya> (diakses pada tanggal 9 Mei 2023 Pukul 19:00 WIB)